

Hubungan Islam dan Negara dalam Al Qur'an Perspektif Mufassir Timur

Rudi Iskandar^{1*}, Apipudin²

Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta

*Correspondence Email: rudiiskandar643@gmail.com

Informasi Artikel

Diterima: 20-01-2024

Disetujui: 28-15-2024

Diterbitkan: 17-03-2024

Abstrak

Studi ini menyelidiki pandangan mufassir timur mengenai hubungan antara Islam dan negara, dengan fokus pada analisis tafsir al-Qur'an. Para mufassir timur, terutama dari wilayah Timur Tengah, dianggap melihat al-Qur'an sebagai panduan utama dalam membentuk negara Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan kepemimpinan yang adil. Tema utama dalam pandangan mereka melibatkan konsep khilafah, keadilan sosial, kepemimpinan yang adil, dan penerapan hukum Islam (syari'ah). Kesimpulan studi menyoroti kesinambungan pandangan ini di antara mufassir Timur, sekaligus mengakui keragaman perspektif yang dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budaya setempat. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang cara mufassir Timur menginterpretasikan al-Qur'an dalam konteks hubungan Islam dan negara serta memberikan landasan pemikiran yang kuat bagi pembentukan struktur negara Islam yang berkeadilan sosial.

Kata Kunci: Hubungan Islam dan Negara; al-Qur'an; Mufassir Timur; Keadilan Sosial

Abstract

This study investigates the views of eastern mufassir regarding the relationship between Islam and the state, with a focus on analysis of the interpretation of the Koran. Eastern mufassir, especially from the Middle East, are thought to see the Koran as the main guide in forming an Islamic state based on the principles of social justice and just leadership. The main themes in their view involve the concepts of the caliphate, social justice, just leadership, and the application of Islamic law (shari'ah). The study's conclusion highlights the continuity of these views among Eastern commentators, while recognizing the diversity of perspectives influenced by local historical and cultural contexts. This research provides an in-depth understanding of how Eastern mufassir interpret the Koran in the context of the relationship between Islam and the state and provides a strong rationale for the formation of an Islamic state structure that is socially just.

Keywords: Relations between Islam and the State; Al-Qur'an; Mufassir Timur; Social justice

Cara Mengutip: Iskandar, R. & Apipudin (2023). Hubungan Islam dan Negara dalam Al Qur'an Perspektif Mufassir Timur. *Cigarskruie: Jurnal Pendidikan & Studi Islam*. Hlm, 1-8 . Vol. 1, No. 2, 2024.

Pendahuluan

Transformasi global dan lokal telah membawa dampak signifikan pada masyarakat Muslim, memicu perlunya pemahaman prinsip-prinsip Islam yang mengatur hubungan antara agama dan negara. Sejumlah penelitian telah memusatkan perhatian pada pandangan Al-



Qur'an dalam interpretasi mufassir Timur untuk memberikan perspektif yang kaya dan terperinci. Beberapa hasil penelitian menyoroti hubungan agama dan negara dalam pemikiran politik Islam di Indonesia, transformasi pendidikan agama Islam di era digital, serta dialektika antara Islam dan budaya lokal, yang menempatkan religi dan ritual lokal sebagai medan kontestasi (Hayati et al., 2023).

Transformasi sosial-politik di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah mencakup peralihan ke sistem politik demokratis, perubahan ekonomi, dan tantangan terhadap nilai-nilai tradisional. Kajian tentang hubungan Islam dan negara dalam Al-Qur'an dapat memberikan dasar teologis dan etika bagi masyarakat Muslim dalam menghadapi perubahan ini. Beberapa penelitian cenderung melihat pemikiran politik tentang hubungan agama dan negara di Indonesia, kebangkitan agama dalam bentuk desekularisasi politik dan sosial, serta pandangan ulama mengenai hubungan Islam dan negara (Marlena, 2020)

Globalisasi dan pengaruh pemikiran Barat membawa konsep-konsep sekularisme dan pluralisme yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, memahami pandangan Al-Qur'an terkait hubungan Islam dan negara dapat membantu menjaga identitas dan nilai-nilai Islam dalam konteks globalisasi. Pentingnya pendidikan agama Islam dalam membentuk identitas Muslim yang kuat, inklusif, dan adaptif dalam konteks global.

Munculnya gerakan-gerakan fundamentalis dan ekstremis di dunia Islam menyoroti pentingnya memahami dengan tepat prinsip-prinsip Islam terkait negara. Kajian Al-Qur'an dari perspektif mufassir Timur dapat memberikan perspektif yang mendalam mengenai konsep-konsep seperti keadilan, kepemimpinan, dan otoritas yang dapat membentuk landasan pemikiran kritis terhadap pemahaman ekstremis. Pemikiran politik tentang hubungan agama dan negara di Indonesia, kebangkitan agama dalam bentuk desekularisasi politik dan sosial, serta pandangan ulama mengenai hubungan Islam dan negara (Imaduddin, 2017).

Mufassir Timur, yang berasal dari berbagai wilayah Timur seperti Persia, India, dan Asia Tengah, memiliki konteks sejarah dan budaya yang berbeda. Mereka membawa pengalaman dan pemahaman lokal dalam menafsirkan Al-Qur'an. Memahami pandangan mereka terhadap hubungan Islam dan negara dapat membuka wawasan baru tentang bagaimana Islam diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam kerangka kebudayaan yang beragam.

Pandangan para Mufassir Timur terhadap hubungan Islam dan negara dapat memberikan wawasan yang kaya akan keragaman interpretasi dan implementasi Islam (Asman et al., 2023). Dalam konteks ini, pemahaman mereka dapat mencerminkan pengaruh

budaya, sejarah, dan tradisi lokal terhadap penafsiran Al-Qur'an dan praktik keagamaan. Hal ini menggambarkan dinamika Islam sebagai agama yang dihayati dan diamankan dalam beragam konteks budaya.

Partisipasi umat Islam dalam kepemimpinan dan pemerintahan di berbagai negara menyoroti perlunya merumuskan kerangka kerja yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (Suhartono & Pahrudin, 2024). Kajian di bidang ini dapat memberikan panduan bagi para pemimpin Muslim dalam menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola suatu negara. Kajian Islam dan kepemimpinan dapat memberikan wawasan mengenai penafsiran dan penerapan Islam dalam konteks budaya yang beragam. Menurut (Marmoah et al., 2023), setiap pekerjaan manusia adalah mulia, dan kepemimpinan merupakan tugas mulia karena menyangkut pemenuhan berbagai tanggung jawab. Para pemimpin umat Islam tidak boleh terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga melalaikan kewajiban agamanya (Mujahidin, 2016).

Studi tentang pemikiran politik Sayyid Qutb, seorang pemikir Islam kontemporer dari dunia Arab, terutama dalam konteks pandangannya mengenai negara dalam interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, dapat memberikan wawasan yang berharga. Pandangan Yusuf Qardawi tentang partisipasi politik Muslim dalam pemerintahan non-Muslim (Sugianto et al., 2021). Selain itu, terdapat pula artikel yang mendiskusikan hubungan antara Islam dan politik di era kontemporer, serta problematika seputar hubungan antara Islam dan politik dalam konteks Arab dan Indonesia (Mudzakkir, 2016). Selain itu, partisipasi politik Muslim dalam berbagai negara, termasuk pembentukan partai politik Islam, juga menjadi topik kajian yang relevan dalam konteks ini. Dengan demikian, analisis terhadap pemikiran politik Sayyid Qutb dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hubungan antara Islam dan pemerintahan dalam beragam konteks.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur atau literature review digunakan untuk menggali pemahaman tentang suatu topik tanpa melibatkan pengumpulan data primer. Dalam konteks studi tentang "Hubungan Islam dan Negara dalam Al-Qur'an (Al-Qur'an dalam Perspektif Mufassir Timur)," kajian literatur dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai pandangan para mufassir Timur terhadap hubungan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Mufassir Timur

Beberapa mufassir Timur menekankan konsep kepemimpinan (khilafah) sebagai prinsip dasar dalam membentuk negara Islam. Mereka dapat menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kepemimpinan sebagai dasar untuk pembentukan pemerintahan Islam yang adil. Khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan umum bagi umat Muslim, di mana dalam penerapannya menggunakan hukum syariat Islam sebagai dasar (Al-Mawardi, 2016). Secara umum, sebuah sistem pemerintahan bisa disebut sebagai Khilafah apabila menerapkan syariat sebagai dasar negara, serta mengikuti cara kepemimpinan Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin dalam menjalankannya. Konsep Khilafah telah menjadi subjek perdebatan dan kontroversi, dengan beberapa pandangan yang berbeda mengenai interpretasi dan penerapannya di antara para sarjana dan kelompok Islam (Dr. M. Samson Fajar, 2021). Pandangan mufassir Timur sering kali menyoroti prinsip keadilan sosial dalam konteks hubungan Islam dan negara. Ayat-ayat yang menyinggung keadilan, distribusi kekayaan, dan perlakuan adil terhadap masyarakat dapat menjadi pusat perhatian mereka. Mufassir Timur mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kepemimpinan sebagai dasar untuk pembentukan pemerintahan Islam yang adil. Konsep khilafah telah menjadi subjek perdebatan dan kontroversi, dengan beberapa pandangan yang berbeda mengenai interpretasi dan penerapannya di antara para sarjana dan kelompok Islam.

Dalam Islam, otoritas dan pemerintahan memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan dan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa pandangan dari para mufassir Timur tentang otoritas dan pemerintahan dalam Islam. Beberapa mufassir menekankan bahwa otoritas tertinggi seharusnya berada di tangan pemimpin Muslim, sedangkan yang lain lebih menekankan konsep konsultasi (shura) dan partisipasi masyarakat. Menurut pandangan yang menekankan otoritas tertinggi pada pemimpin Muslim, pemimpin harus memiliki kekuasaan yang kuat untuk menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat. Namun, kekuasaan tersebut harus dijalankan dengan adil dan berdasarkan hukum Islam. Pandangan ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan adil. Aspek pertanggungjawaban sosial sering muncul dalam tafsir mufassir Timur. Mereka mungkin menyoroti tanggung jawab sosial pemerintah untuk memastikan keadilan, pelayanan masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Pandangan mufassir Timur tentang pertanggungjawaban sosial dalam Islam berbeda-beda. Beberapa mufassir menganggap bahwa pemerintah harus memastikan keadilan, pelayanan masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sebagai tanggung jawab

sosial. Namun, ada juga mufassir yang menganggap bahwa tanggung jawab sosial ini tidak hanya berada pada pemerintah, tetapi juga pada masyarakat dan individu. Pandangan ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan pentingnya keadilan, pelayanan masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Pandangan ini juga mengacu pada konsep shura dalam Islam, yang menunjukkan bahwa pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap keadilan dan pelayanan masyarakat.

Konteks Sejarah dan Budaya

Konteks sejarah dan budaya mufassir Timur mempengaruhi pandangan mereka terhadap hubungan Islam dan negara. Sejarah tafsir al-Quran terus mengalami dinamika seiring dengan tantangan zaman dan problem yang dihadapi Masyarakat (Affani, 2019) Dalam sejarah dunia Islam, kajian terhadap al-Quran telah dilakukan semenjak zaman Rasulullah hingga masa kini (Saha, 2015). Karya-karya tafsir di Indonesia mengalami dinamika yang menarik, baik dari segi penyampaian, tema-tema kajian, serta sifat penafsir. Pada dasarnya, kajian tafsir Indonesia mengandung tiga dimensi utama yaitu metodologi, historis, dan etika (Igisani, 2018). Madani di kalangan mufassir tradisional ini belum mencerminkan usaha penafsiran yang mengaitkan secara serius antara konteks sosial dan budaya masing-masing (Ikhwan, 2016).

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an meliputi kecenderungan dan minat penafsir, pengetahuan linguistik, referensi teks, afiliasi aliran, adat istiadat, metode, dan teknik interpretasi yang berbeda. Seorang mufassir harus terikat pada aturan-aturan penafsiran yang diusulkan oleh para ulama. Namun, terkadang kecerobohan mufassir dalam menerima teks-teks sekunder atau sebab-sebab lain dapat berpotensi menyebabkan ketidakberesan dan kesalahan dalam interpretasi. Variasi dan perbedaan interpretasi adalah suatu keharusan, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Al-Qur'an bebas dari interpretasi (Afroni, 2018).

Relevansi dengan Konteks Kontemporer

Konsep kepemimpinan dalam Islam dikaitkan dengan konsep "khalifah", yang merupakan pemimpin yang mengacu pada model kepemimpinan "khalifah" yang berorientasi pada tujuan dan tugas pokok manusia, yaitu sebagai 'abd dan khalifah fil ardh. Pendidikan Islam orientasi pada tujuan dan tugas pokok manusia, yaitu sebagai 'abd dan khalifah fil ardh, dan ini merupakan kepemimpinan ideal dalam Islam (Hidayatussaliki & Hamidah, 2022).

Globalisasi telah mengubah global scenario, menjadikan dunia menjadi global village, dan membawa tinggi seni kompetisi dan kontensi antara organisasi di level nasional dan internasional (Manzoor, 2023). Islam adalah agama kaffah yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan, dikarenakan dengan adanya imamah ini aspek kesejahteraan, falah dan keadilan dalam suatu negara dalam skala besar dan amanah yang melekat pada individu (Tugiah & Hendriani, 2022).

Perbandingan Perspektif

Perbandingan pandangan mufassir Timur dari wilayah yang berbeda dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang keragaman interpretasi dalam hubungan Islam dan negara. Analisis terhadap pengaruh geografis, kultural, dan sejarah dapat membantu menjelaskan perbedaan-perbedaan ini. Mufassir Timur Tengah cenderung memandang Al-Qur'an sebagai panduan bagi pembentukan negara Islam yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan kepemimpinan yang adil. Keadilan sosial menjadi salah satu prinsip utama dalam interpretasi mufassir Timur Tengah. Mereka cenderung menyoroti ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan keadilan, distribusi kekayaan, dan perlakuan adil terhadap seluruh masyarakat. Budaya Arab dan tradisi hukum Islam yang khas memiliki dampak signifikan pada tafsir mufassir Timur Tengah. Perhatian terhadap nilai-nilai Arab dan kultural dalam interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an terkait negara dan masyarakat.

Mufassir di wilayah Asia Selatan mungkin cenderung menekankan prinsip-prinsip keadilan sosial dan partisipasi masyarakat dalam konteks hubungan Islam dan negara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemikiran-pemikiran seperti prinsip keadilan sosial dalam Islam, penerapan konsep "keadilan ramah gender" dalam pembagian harta waris, dan prinsip-prinsip demokrasi dalam Alquran menjadi fokus kajian di wilayah tersebut (Ahyani et al., 2023) Selain itu, terdapat juga penelitian yang membahas feminisme Islam sebagai hasil dialog intensif antara prinsip-prinsip keadilan dan kesederajatan (Izziyana, 2017). Hal ini menunjukkan adanya minat dan penekanan pada isu-isu keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan kesetaraan gender dalam konteks Islam di wilayah Asia Selatan.

Keduanya mungkin sepakat bahwa Islam memberikan panduan yang jelas terkait prinsip-prinsip pemerintahan dan keadilan sosial. Pentingnya kepemimpinan adil dan pertanggungjawaban sosial dapat menjadi tema umum. Perbedaan dalam penekanan terhadap aspek-aspek tertentu, seperti kepemimpinan vs. partisipasi masyarakat, dapat terjadi dalam interpretasi hukum Islam dan tradisi lokal. Ini tercermin dari perbedaan budaya dan sejarah yang mempengaruhi cara mengaplikasikan hukum dan tradisi. Misalnya, dalam hubungan

antara agama dan negara, Indonesia dikatakan sebagai negara yang secara kelembagaan berbentuk sekuler tetapi secara filosofis berbentuk agama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam interpretasi hukum Islam dan tradisi lokal, ada perbedaan dalam penekanan terhadap aspek-aspek tertentu, seperti kepemimpinan vs. partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam interpretasi hukum Islam dan tradisi lokal, ada perbedaan dalam penekanan terhadap aspek-aspek tertentu, seperti kepemimpinan vs. partisipasi masyarakat.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan studi "Hubungan Islam dan Negara dalam Al-Qur'an (Al-Qur'an dalam Perspektif Mufassir Timur)," dapat dihasilkan beberapa kesimpulan penting berdasarkan analisis terhadap pandangan mufassir Timur dan interpretasi mereka terhadap Al-Qur'an. Bahwa mufassir Timur melihat Al-Qur'an sebagai panduan utama dalam membentuk landasan konstitusional dan hukum bagi negara Islam. Pandangan ini menekankan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat dan seharusnya menjadi dasar pembentukan negara. Terdapat konsistensi dalam menyoroiti keadilan sosial sebagai prinsip utama yang harus menjadi pijakan negara Islam. Mufassir Timur menekankan pentingnya distribusi kekayaan, perlakuan adil, dan tanggung jawab sosial sebagai elemen utama dalam pemerintahan Islam. Pandangan tentang kepemimpinan yang adil atau khilafah sering muncul sebagai tema penting. Mufassir Timur menginterpretasikan ayat-ayat yang membahas tugas dan tanggung jawab pemimpin Muslim untuk memastikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Affani, S. (2019). Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya. Kencana.
- Afroni, S. (2018). Teknik Interpretasi Dalam Tafsir Al Qur'an Dan Potensi Deviasi Penerapannya Menurut Ilmu Dakhil. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(01).
- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 73–100.
- Al-Mawardi, I. (2016). *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press.
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, H., Muchtar, M. I., & Qurtubi, A. N. (2023). *PENGANTAR HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dr. M. Samson Fajar, M. Sos. I. (2021, August 1). Khilafah adalah Prinsip Leadership Tertinggi. <https://Ummetro.Ac.Id/Khilafah-Adalah-Prinsip-Leadership-Tertinggi/>.
- Hayati, M., Putri, F., Hafizh, M., & Januar, J. (2023). Transformasi Pendidikan Agama Islam di Era Digital: Perspektif Sosial dan Tantangan Kontemporer. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 224–235.
- Hidayatussaliki, T. H. H., & Hamidah, T. (2022). Model Kepemimpinan Islam dalam Al-Qur'an Melalui Kajian Tematik. *Ibtida'iy: Jurnal Prodi PGMI*, 7(2), 13–23.
- Igisani, R. (2018). Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia. *Potret Pemikiran*, 22(1).

- Ikhwan, M. (2016). Tafsir alquran dan perkembangan zaman: merekonstruksi konteks dan menemukan makna. *Nun*, 2(1), 266121.
- Imaduddin, M. (2017). Dampak Liberalisasi Pemikiran Islam terhadap Kehidupan Sosial. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 15(1), 93–119.
- Izziyana, W. V. (2017). Pendekatan feminisme dalam studi hukum Islam. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 139–158.
- Manzoor, S. (2023). The Model of Visionary and Innovative Islamic Leadership. *Society*, 11(1), 41–51.
- Marlena, L. (2020). Hubungan Islam Dan Negara Dalam Pandangan Ahmad Syafii Maarif. *Manthiq*, 3(2).
- Marmoah, S., Mulia, B. N., & Nafisah, A. (2023). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Manajemen Kelas Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 13(1), 162–173.
- Mudzakkir, A. (2016). Islam dan politik di era kontemporer. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 31–48.
- Mujahidin, A. (2016). Islam dan Kepemimpinan (Sebuah Catatan untuk Pemimpin dan Calon Pemimpin Muslim)(Akhmad Mujahidin). Univ. Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. URL <https://www.uin-suska.ac.id/2016/04/18/Islam-Dan-Kepemimpinan-Sebuah-Catatan-Untuk-Pemimpin-Dan-Calon-Pemimpin-Muslim-Akhmad-Mujahidin/> (Accessed 7.30. 22).
- Saha, S. (2015). Perkembangan Penulisan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia Era Reformasi. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 13(1), 59–84.
- Sugianto, S., Hidayat, R., & Sujarwo, A. (2021). Partisipasi Politik dalam Pemerintahan Non Muslim Perspektif Yusuf Qardawi. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 3(2), 50–68.
- Suhartono, S., & Pahrudin, A. (2024). Demokrasi Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi. *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, 16(1), 43–52.
- Tugiah, T., & Hendriani, S. (2022). Kepemimpinan Dalam Sudut Pandang Islam. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 2(6), 516–524.